

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
DINAS DAERAH (SIADINDA) DALAM PENGELOLAAN
DATA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan Oleh

DEA PUTRI RAMADHANI

4517013059



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Dea Putri Ramadhani

Stambuk/NIM : 4517013059

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

UNIVERSITAS

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Firman Manne, SE., M.Si., Ak., CA


Adil Setiawan, SE, M.Si., Ak.,CA

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

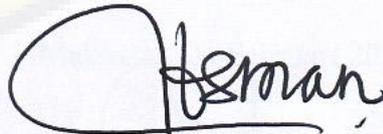
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi


Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH


Dr. Firman Manne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan.....

PERYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Putri Ramadhani
Nim : 4517013059
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas
Daerah (SIADINDA) Dalam Pengelolaan Data Keuangan
Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 23 Februari 2022



Dea Putri Ramadhani

4517013059

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS FOR THE REGIONAL SERVICES (SIADINDA) IN FINANCIAL DATA MANAGEMENT IN THE REGIONAL FINANCIAL AGENCY AND ASSETS OF THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

By:

Dea Putri Ramadhani

Accounting Study Program

Faculty Of Economics And Business,

University Of Bosowa Makassar

ABSTRACT

Dea Putri Ramadhani. 2022. Thesis. Analysis of the Application of the Regional Office of Accounting Information System (SIADINDA) in the Management of Financial Data at the Regional Finance and Assets Agency of South Sulawesi Province. Supervised by Firman Manne and Adil Setiawan.

whether the application of SIADINDA in financial data management at the Regional Finance and Asset Agency of South Sulawesi Province.

The method of data collection in this research is by means of interviews, observations, and documentation with informants from the research site, namely employees of the Finance Section of the Regional Finance and Assets Agency of South Sulawesi Province. The analytical method used is to obtain an overview of the research object, collect information, identify problems, and analyze data. The results showed that the application of SIADINDA in financial data management at the Regional Finance and Assets Agency of South Sulawesi Province was effective in accordance with the measurement indicators of accounting information systems, namely availability, security, maintainability and integration.

Keywords: *System Application, Regional Office Accounting Information System (SIADINDA), Financial Report.*

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DINAS DAERAH (SIADINDA) DALAM PENGELOLAAN DATA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh:

DEA PUTRI RAMADHANI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Dea Putri Ramadhani. 2022. Skripsi. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Firman Manne dan Adil Setiawan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan apakah penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari tempat penelitian yaitu pegawai Bagian Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan yaitu memperoleh gambaran umum dari objek penelitian, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi permasalahan, dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif sesuai dengan indikator pengukuran sistem informasi akuntansi yaitu ketersediaan, keamanan, dapat dipelihara dan integrasi.

Kata Kunci : Penerapan Sistem, Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA), Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Penulis ucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Hermawati Abu Bakar, S.E, MM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Bapak Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Adil Setiawan, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang

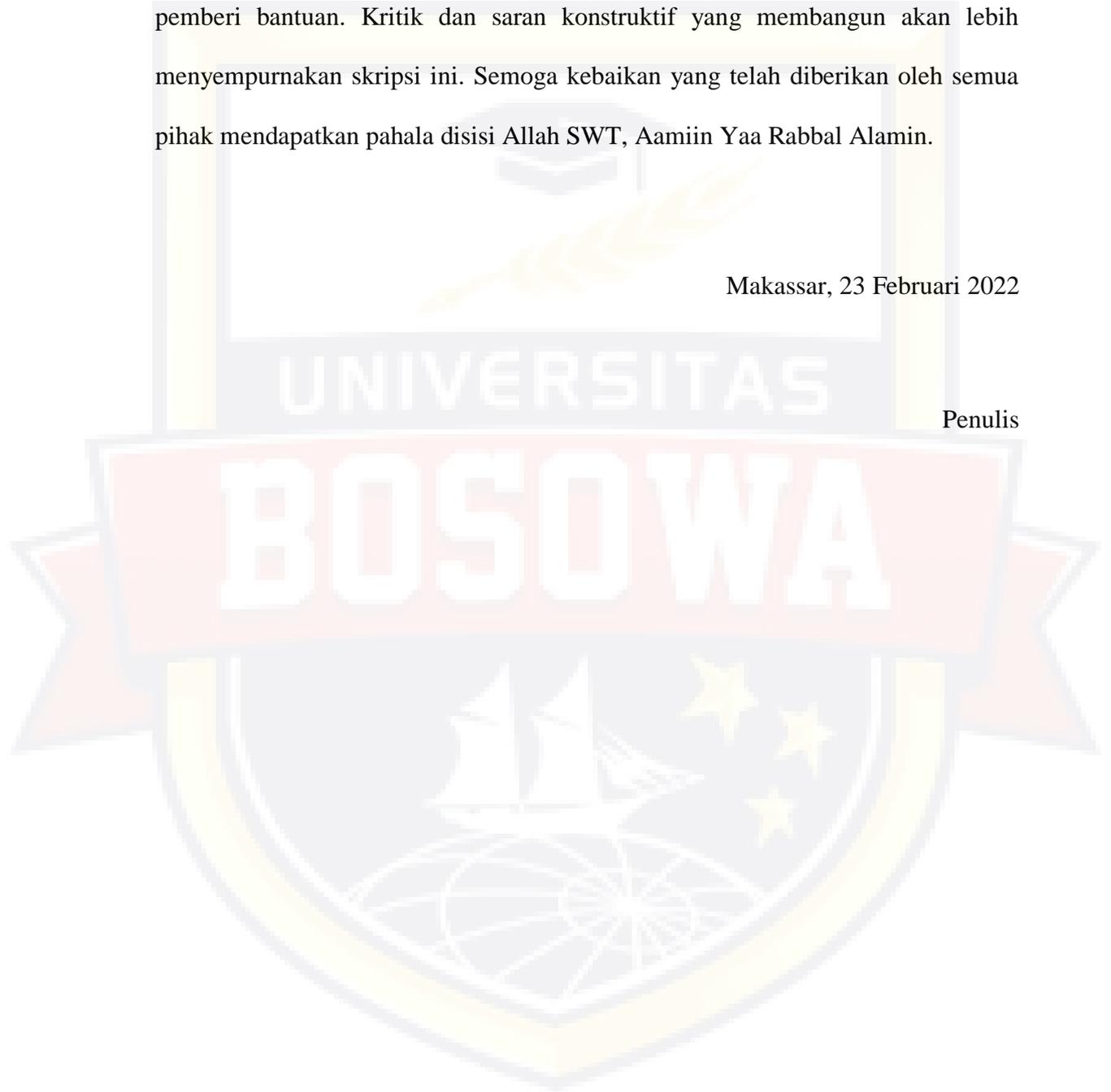
telah diluahkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Ibu Indah Syamsuddin, SE, M.Ak dan Ibu Nur Fadhilah Amri, SE. M.Si, Ak sebagai dosen penguji skripsi serta segenap tim penguji skripsi lainnya yang telah menguji, mengoreksi, mengkritik dan memberikan saran kepada penulis sehingga skripsi ini bisa lebih bermakna dan berguna.
7. Seluruh dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, terimakasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
8. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Yuhaeri dan ibunda tersayang Aisyah Syam, serta nenek dan Alm. kakek yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
9. Saudara terkasih, Muh. Fahrul, Muh. Fadhil dan Diva Aprilia serta segenap keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ziefen, terimakasih atas dorongan semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman seperjuanganku khususnya Cucang, Miftha, Sintya, Agung, Icha, Sisdahliah, dan Nurafianti. Terimakasih atas dorongan semangat, bantuan dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala disisi Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, 23 Februari 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 Penerapan Sistem	9
2.1.2 Pengertian Informasi	10
2.1.3 Pengertian Akuntansi	10
2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi	11
2.1.5 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	12
2.1.6 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi	15
2.1.7 Peranan Sistem Informasi Akuntansi.....	16
2.1.8 Indikator Sistem Informasi Akuntansi	16
2.2 Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA)	17
2.3 Pengertian Laporan Keuangan	19
2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan	20
2.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan	21
2.3.3 Kualitas Laporan Keuangan	23
2.3.4 Komponen-Komponen Laporan Keuangan	24

2.3.5	Keterbatasan Laporan Keuangan	27
2.4	Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.2	Jenis Data dan Sumber Data	31
3.2.1	Jenis Data	31
3.2.2	Sumber Data	31
3.3	Metode Pengumpulan Data	32
3.4	Metode Analisis Data	32
3.5	Defenisi Operasional	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	35
4.1.1	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	35
4.1.2	Struktur Organisasi	37
4.1.3	Job Description	38
4.2	Hasil Penelitian	45
4.2.1	Pemahaman dan Keberhasilan Penerapan SIADINDA dalam Pengelolaan Data Keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan	46
4.2.2	Faktor Pendukung yang Dimiliki BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Sehingga Menerapkan SIADINDA	51
4.2.3	Hambatan dalam Menggunakan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan	54
4.3	Pembahasan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		

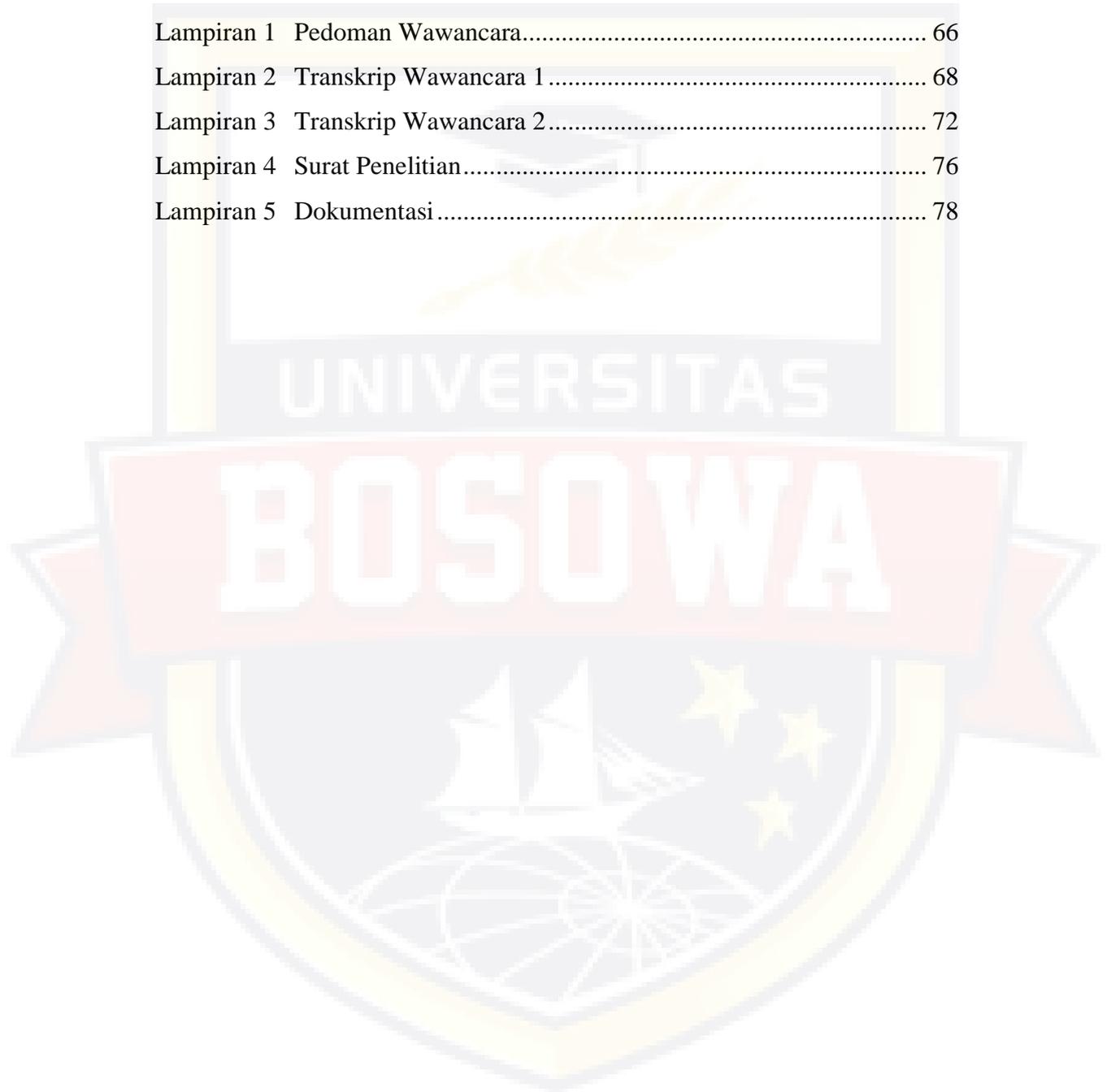
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	66
Lampiran 2	Transkrip Wawancara 1	68
Lampiran 3	Transkrip Wawancara 2.....	72
Lampiran 4	Surat Penelitian.....	76
Lampiran 5	Dokumentasi	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi saat ini, membuat perkembangan dibidang sistem informasi sangat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Informasi merupakan *output* dari suatu sistem informasi. Guna memperoleh informasi, maka diperlukan data karena merupakan input dari suatu sistem (Suryanawa dan Abhimantra, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Ketentuan sistem informasi keuangan daerah, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini, sehingga pemerintah dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan publiknya.

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi. Oleh karena itu, di era otonomi daerah ini, untuk mewujudkan pemeritahan yang efektif, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan *E-Government*. *E-Government* adalah implementasi pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk produktivitas pemerintah dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable keuangan pemerintah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan *e-Government* merupakan salah satu bidang yang

berorientasi pada pelayanan publik dimana pelayan publik yang efektif dan efisien dapat mendukung terwujudnya *good governance*.

Salah satu sistem informasi yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dimana sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data, menyimpan data tentang aktivitas transaksi keuangan dan memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Yanti dan Musmini, 2020). Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem untuk mengelompokkan, mencatat dan mengolah keuangan pemerintah dalam laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, informasi keuangan daerah dapat dikelola dan diakses secara cepat dan akurat.

Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang masalah Pemerintah Daerah dalam mengatur bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaporkan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan memerlukan upaya khusus untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Setelah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah tersebut kemudian diberikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Komponen laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (SAK, 2015). Sebelumnya sistem pelaporan keuangan masih secara manual atau tradisional, saat ini sudah menggunakan suatu aplikasi yang merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi secara keseluruhan yaitu mengenai data pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Yanto dan Akfir, 2019).

Pengelolaan data keuangan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi mampu mengurangi terjadinya kesalahan. Dibandingkan dengan proses manual, pengolahan data keuangan dengan sistem informasi akuntansi dapat memproses dan menyajikan data dengan cepat dan *up to date* sehingga dapat digunakan setiap saat. Keandalan dan ketelitian sistem informasi akuntansi juga lebih tinggi dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Melihat kondisi tersebut maka sistem informasi akuntansi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola suatu unit usaha. Aktivitas bisnis perusahaan yang semakin berkembang pesat membutuhkan informasi akuntansi yang dipercaya, relevan, tepat waktu, mudah dipahami dan teruji. Yang mana hal ini akan lebih mudah dipenuhi jika pengolahan data keuangan dilakukan dengan menggunakan komputer (Setyowati dan Respati, 2017).

Pengenalan *e-Government* sebagai bentuk inovasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui layanan online, dan menghadirkan berbagai bentuk inovasi lain, salah satunya sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA). Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) merupakan Sistem informasi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan ditingkat organisasi pemerintah daerah baik pada provinsi, kabupaten, maupun kota dengan mengikuti kaidah undang-undang serta peraturan. SIADINDA telah dirancang menerapkan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Premendagri No. 64 Tahun 2013 perihal Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada pemerintahan daerah yang paling khusus kepada identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pelaporan dan interpretasi atau hasil laporan keuangan tersebut.

Diantara sekian banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini, Pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang telah mengambil langkah untuk memperkenalkan salah satu inovasi dalam sistem *e-government* yaitu Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA). Hal ini juga tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, sesuai amanat SK No. 8 Tahun 2008 dari Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan beberapa program untuk mengimplementasikan aspek transparansi keberlanjutannya, salah satunya adalah setiap SKPD memiliki satuan kerja yang wajib menyediakan pelaporan secara online.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu SKPD yang menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA). Pemerintah Daerah sedang mengembangkan SIADINDA yang memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah, yang meliputi : Laporan Pelaksanaan Anggaran, Anggaran, dan Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah. Proyek SIADINDA harus memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena dapat menyajikan laporan keuangan daerah secara akurat, andal dan tepat waktu. Pasalnya, pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sangat membutuhkan aplikasi seperti ini.

Sebelum penerapan SIADINDA, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pengelolaan keuangannya secara manual, artinya tidak ada acuan baku dalam menyusun format pelaporan. Hal ini karena pihak berwenang mengandalkan pemahaman mereka saat menyusun laporan, bahkan jika mereka umumnya tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, SIADINDA mulai diterapkan untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah khususnya pelaporan keuangan, mengefektifkan dan mengefisienkan pola kerja aparatur sipil negara dalam penatausahaan keuangan, memudahkan pengambilan keputusan dan mempercepat proses menyediakan informasi.

Dalam pengoperasian aplikasi SIADINDA dan penginputan transaksi atau kejadian keuangan, hal ini hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan atau berwenang untuk mengelola keuangan daerah, dan juga pada saat penginputan data masih kurang efisien karena jika terjadi kesalahan harus diulang

dari awal karena hanya ada opsi hapus dan tidak ada opsi ubah. Selain itu, sering mengalami akses yang lambat ke sistem, karena aplikasi SIADINDA online dan tersedia untuk semua pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengelola keuangan.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) bertujuan untuk mendorong dan khususnya menjamin pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, mekanisme dan implementasinya belum berjalan dengan baik pada awal pengenalan produk ini, sehingga karyawan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan saran ahli. Perubahan yang dilakukan melalui penerapan sistem memerlukan transisi, yang bagi sebagian karyawan dapat menyebabkan konflik adaptasi. Adaptasi penerimaan sistem dapat dilihat lebih cepat dengan kecenderungan kearah manfaat dan kemudahan yang dirasakan oleh karyawan. Hal ini sejalan dengan prinsip - prinsip *good governance* di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sejauh ini, tingkat keberhasilan proyek TI secara keseluruhan masih rendah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diperoleh yaitu bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA)

dalam pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) dalam pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang sistem informasi akuntansi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas atau untuk penelitian lanjutan terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
2. Bagi Akademisi
 - a. Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sistem informasi akuntansi yang sangat berkaitan erat dengan keuangan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam aktivitas ke depannya.

- b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengembalian kebijakan serta membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah

- a. Diharapkan hasil temuan ini dapat digunakan dan membantu mengembangkan pengetahuan ilmu akuntansi dalam penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan data keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi tempat penelitian sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan data keuangan.

BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian penjelasan atau teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam masalah tertentu. Melalui ini penulis mengemukakan berbagai kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian.

2.1.1 Penerapan Sistem

Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya. Menurut Trisno *et.al.*, (2017) pada dasarnya bahwa: “Penerapan adalah pemakaian suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem. Untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat berikut: sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru harus diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget”.

Sedangkan sistem merupakan gabungan dari berbagai elemen yang bekerjasama untuk mencapai suatu target atau tujuan. Pada pendapat yang dikemukakan menurut Suharni dan Sari (2019), pendapat tersebut mengemukakan bahwa:

“Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan serangkaian unsur-unsur yang saling berkaitan dan bekerjasama menyelesaikan suatu sasaran tertentu untuk mempermudah bagi pembuat maupun yang pengguna sistem tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem merupakan proses pelaksanaan suatu gagasan atau rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa unsur, baik fisik maupun nonfisik dengan harapan orang lain dapat

menerima dan melakukan perubahan dalam melaksanakan program-program yang telah di rumuskan untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.2 Pengertian Informasi

Informasi adalah fakta yang mempunyai arti dan berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian informasi menurut Suharni dan Sari (2019) yaitu: “Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya untuk menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata (fakta) yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan”.

Pendapat berbeda juga di kemukakan oleh Agustin (2018), dalam hal ini mengemukakan bahwa:

“Informasi adalah data yang diolah dan berguna bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan. Informasi yang baik adalah informasi yang memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pemakainya. Pemakai akan menggunakan informasi untuk perencanaan, koordinasi, evaluasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi harus mempunyai ciri-ciri, yaitu dapat mengurangi ketidakpastian, dapat menggambarkan adanya berbagai peluang dan dapat mengevaluasi hasil”.

Dari beberapa teori yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil dari pengolahan data atau data yang sudah di proses menjadi sebuah bentuk yang lain kemudian digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berguna bagi penerimanya.

2.1.3 Pengertian Akuntansi

Menurut Rahmawati *et.al.*, (2019) mengemukakan pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi diartikan sebagai proses dari pengidentifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa informasi atau laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan saat ini dimana akan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan mengenai pengambilan keputusan, kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan dimasa mendatang”.

Hal ini sejalan dengan teori menurut Situmorang dan Hapsari (2019)

mengemukakan bahwa:

“Akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari tentang rekaman atas pencatatan kegiatan dan transaksi yang terjadi pada suatu kegiatan ekonomi dimana pencatatannya dan rekaman itu dicatat dalam sebuah jurnal dan laporan yang menjadi alat dan bahan pertimbangan keputusan pihak-pihak yang terkait dalam memutuskan kegiatan ekonomi yang berlangsung”.

Pendapat berbeda dikemukakan menurut Massie *et.al.*, (2018) dalam hal ini

mengemukakan bahwa:

“Akuntansi merupakan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis pada suatu bisnis selama periode tertentu, yang dimaksudkan dengan transaksi disini ialah persetujuan antara dua pihak, di mana salah satu pihak menjual barang atau jasa, sedangkan pihak lain membeli barang atau jasa tersebut”.

Dari beberapa teori yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi merupakan aktivitas dalam perusahaan yang menghasilkan informasi akuntansi tentang kondisi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian sistem informasi akuntansi yang dikemukakan oleh Natalegawa dan Gunadi (2021) berdasarkan sudut pandang yaitu: “Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat segala jenis kegiatan dalam perusahaan seperti kegiatan transaksi pada perusahaan, sehingga hal yang berkaitan dengan transaksi akan tercatat langsung dalam sistem”.

Hal ini sejalan dengan teori menurut Rahmawati *et.al.*, (2019) menyatakan bahwa: “Sistem informasi akuntansi merupakan suatu proses dari pengumpulan, pencatatan, menyimpan data menjadi sebuah informasi yang mana informasi tersebut akan menjadi acuan dari suatu pengambilan keputusan dimasa sekarang atau masa mendatang”.

Sejalan dengan pendapat dari Heriyanto (2018) mengemukakan tentang sistem informasi akuntansi yaitu: “Sistem informasi akuntansi merupakan data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling mendukung sehingga menjadi informasi yang berharga bagi yang menerimanya”.

Pendapat berbeda dikemukakan menurut Darma dan Sagala (2020) dalam hal ini mengemukakan bahwa: “Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber daya yang bekerjasama secara harmonis mengolah data keuangan menjadi sebuah informasi keuangan dan menyampaikan informasi tersebut kepada para pengguna”.

Dari beberapa teori yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah mencatat, mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data yang menjadi suatu informasi atau laporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.1.5 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan bagi pemakai akuntansi, yaitu pihak luar (*esktern*) organisasi perusahaan dan pihak dalam (*intern*) organisasi

perusahaan. Menurut Damayanti *et.al.*, (2021) beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan perusahaan.
2. Memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen tentang perencanaan dan pengendalian usaha.
3. Melakukan kontrol yang efektif dan tepat terhadap aset-aset perusahaan.
4. Pengawasan terhadap semua aktivitas keuangan perusahaan.
5. Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan.
6. Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat.

Sedangkan menurut Azhar Susanto dalam penelitian Purnamasari (2016) fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari agar tetap dapat eksis, suatu perusahaan harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis seperti dengan melakukan transaksi pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan. Transaksi akuntansi menghasilkan data akuntansi untuk diolah oleh sistem pengolahan transaksi (SPT) yang merupakan bagian atau sub dari sistem informasi akuntansi, data-data yang bukan merupakan data transaksi akuntansi dan data transaksi lainnya yang tidak ditangani oleh sistem informasi lainnya yang ada di perusahaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi diharapkan dapat melancarkan operasi yang dijalankan perusahaan.

2. Mendukung proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan.
3. Membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab yang penting adalah keharusan memberi informasi kepada pemakai yang berada diluar perusahaan atau stakeholder yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analis keuangan, asosiasi industri atau bahkan publik secara umum.

Adapun tujuan sistem informasi akuntansi yang dikemukakan menurut Jermias (2016), dalam hal ini yaitu :

1. Untuk menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal.
2. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen suatu perusahaan, karena manajemen bertanggungjawab untuk menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.
3. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk melakukan tanggungjawab pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Made (2016) ada tiga tujuan utama bagi sistem informasi akuntansi yaitu :

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Pengurusan manajemen merujuk pertanggungjawaban manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara baik dan benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya kepada pemakai informasi melalui laporan keuangan yang dibutuhkan.
2. Untuk pengambilan keputusan manajemen, Sistem informasi akuntansi ini akan memberikan informasi yang diperlukan kepada para manajer untuk melakukan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan tersebut.
3. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan hari demi hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personil operasi dalam membantu pengerjaan tugas setiap hari secara efisien dan efektif.

2.1.6 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Hertati dan Safkaur (2020) terdapat beberapa karakteristik sistem informasi akuntansi yaitu:

1. *Integration* yaitu, sistem informasi yang terhubung antara sub-sub sistem satu dengan yang lainnya dapat bekerja sama secara harmonis guna mencapai tujuan.
2. *Flexibility* yaitu, sistem informasi yang dapat memberi informasi kapanpun dimanapun.
3. *Reliability* yaitu, sistem informasi yang dapat memberi informasi dengan tepat dan akurat.

2.1.7 Peranan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Jermias (2016) ada tiga peran penting dari sistem informasi akuntansi yaitu:

1. Penghimpunan serta penyimpan data kegiatan transaksi. Sistem mempunyai database sekumpulan data yang terbentuk atas perintah penginput oleh pengguna. Sistem akan menyimpan seluruh riwayat suatu transaksi dari pengguna pihak yang tak bertanggungjawab.
2. Pengolah data. Sistem dirancang mampu untuk mengolah data berdasarkan pada siklus akuntansi menjadi sebuah laporan informasi sehingga dapat dipergunakan dalam pengambilan sebuah keputusan managerial.
3. Pengendali aktiva dan manajemen strategis. Sistem bisa menyajikan pengelolaan aktiva dengan mengacu pada metode penyusunan, penilaian dan mampu menjadi acuan dalam penentuan sebuah strategi bisnis.

2.1.8 Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Model pengukuran keberhasilan sistem informasi yang lain dikemukakan oleh *American Institute of Chartered Public Accountants* (AICPA) dalam penelitian Sidik, Muchamad (2016) memberikan empat indikator sistem informasi akuntansi sebagai berikut :

1. Ketersediaan (*availability*)

Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantumkan pada pernyataan atau perjanjian tingkat pelayanan.

2. Keamanan (*security*)

Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Hal ini akan membantu mencegah :

- a. Penggunaan yang tidak sesuai, pemutar balikan, penghancuran, atau pengungkapan informasi dan software.
 - b. Pencurian sumber daya sistem.
3. Dapat dipelihara (*maintainability*)

Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integrasi sistem.

4. Integrasi (*integrity*)

Pemrosesan sistem bersifat lengkap akurat, tepat waktu, dan diotorisasi, Sebuah sistem dikatakan memiliki integrasi apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA)

Pada pendapat yang dikemukakan menurut Murfa Surya Mahardika (2018) mengemukakan bahwa: “SIADINDA merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan di tingkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baik provinsi, kabupaten, maupun kota dengan mengikuti kaidah undang-undang dan peraturan”.

Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) telah didesain dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah yang lebih mengkhhususkan kepada identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta interpretasi atas hasil laporan keuangan tersebut. SIADINDA dibangun dengan memanfaatkan sistem informasi termutakhir sehingga mampu secara efektif membantu kerja aparatur sipil Negara dan mempercepat proses penerapan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang bermuara kepada peningkatan kinerja OPD daerah secara langsung.

Adapun keunggulan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) menurut Murfa Surya Mahardika (2018) yaitu sebagai berikut :

1. Efektif, sebagai produk sistem informasi, SIADINDA dirancang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi yang diamanatkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sehingga secara langsung dapat membantu kerja aparatur sipil negara dan kinerja instansi secara umum.
2. Efisien, dari mulai perhitungan, penambahan, pengurangan, perumusan, serta penyusunan tabel dapat terotomatisasi dalam SIADINDA, sehingga bukan saja waktu yang dapat dihemat namun juga tenaga dan biaya.
3. Adaptif, SIADINDA dapat dimodifikasi menyesuaikan dengan dinamika pemerintahan terutama yang diakibatkan oleh perubahan ataupun penambahan perundangan dan peraturan yang berlaku.
4. Aman, Penggunaan sistem yang termutakhir dan otorisasi pengguna berlapis membuat SIADINDA aman dari pelanggaran privasi.

5. Informatif, SIADINDA menghasilkan beragam laporan yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Laporan yang dihasilkan tidak saja berguna untuk menyelesaikan kewajiban dalam pertanggungjawaban, namun berguna sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
6. Integratif, Mengingat pengelolaan keuangan daerah yang secara global bersifat kesatuan, maka SIADINDA sengaja diciptakan terbuka untuk berintegrasi dengan produk aplikasi keuangan perusahaan kami.
7. Interoperabilitas, SIADINDA memiliki kapabilitas antar muka untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain tanpa batasan akses atau implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dinas daerah (SIADINDA) merupakan suatu bentuk memanfaatkan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual maupun elektronik dalam mengambil data pembukuan dan melaporkan semua transaksi keuangan, aset, utang, serta seluruh entitas pemerintah daerah.

2.3 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya untuk mengetahui dan mengevaluasi laporan keuangan guna memprediksi keadaan hasil keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), mengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan”.

Pendapat berbeda juga dikemukakan menurut Darbianda (2018) dalam hal ini mengemukakan bahwa, “Laporan keuangan adalah tahapan penyampaian

informasi keuangan perusahaan/lembaga kepada pihak yang membutuhkan untuk mendukung tindakan mereka dalam mengambil suatu keputusan.

Pendapat yang dikemukakan menurut Purwanti (2017) terlihat adanya kesamaan pada pendapat yang lain, yaitu:

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah”.

Laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan menjadi suatu informasi. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rahmayuni (2017) mengemukakan bahwa: “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu, laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.

Dari beberapa teori yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan seluruh transaksi keuangan atau kondisi keuangan suatu entitas baik sektor publik maupun swasta, yang dimana hasil laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi sebuah informasi dan bermanfaat bagi pihak yang menggunakannya.

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (SAK – PSAK 2016) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 dalam penelitian Mu'am (2016) mengemukakan tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya financial.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya yang mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

2.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik merupakan persyaratan *normative* yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dikemukakan oleh Purwaningrum (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feed back value*) informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi di masa lalu, memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, tepat waktu informasi disajikan sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, lengkap informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin.
2. Andal, Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya perbandingan dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Perbandingan internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan secara eksternal dapat dilakukan

bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang diterapkan, perubahan tersebut terungkap pada periode terjadi perubahan.

4. Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempeleajari informasi yang dimaksud.

2.3.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan suatu entitas sangat tergantung pada seberapa besar informasi yang disajikan. Menurut Maryana, *et.al.*, (2018) mengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengukur atau menentukan kualitas entitas organisasi. Kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada seberapa besar informasi yang disajikan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya serta bagaimana laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan kerangka konseptual, prinsip dasar, dan tujuan akuntansi”.

Pada pendapat berbeda dikemukakan oleh Yuliani dalam penelitian Setyowati, *et.al.*, (2016) menyatakan bahwa:

“Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah di Indonesia. Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern”.

2.3.4 Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporannya yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan financial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan – LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/Defisit – LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Pengguna saldo anggaran lebih

- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Saldo anggaran lebih akhir

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintahan daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintahan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013).

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*asset*), utang (*liabilities*), dan modal sendiri (*owners' equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun (Jumingan, 2017).

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan – LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
- d. Pos luar biasa
- e. Surplus/defisit – LO (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013)

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (Bahri, 2016).

Sedangkan menurut PEMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013 Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan ekuitas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi yang langsung menambahkan atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan mendasar seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan antara lain:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas ekuitas.
- b. Informasi tentang kebijakna fiskal

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan dan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam selama pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh Peryataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013).

2.3.5 Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki beberapa batasan. Adapun keterbatasan laporan keuangan menurut Jumingan (2017) yang mengatakan bahwa:

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periode pada dasarnya merupakan interim report dan bukan merupakan laporan final.

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatan pasti tetapi yang sebenarnya dasar penyusunan dengan standar nilai berbeda.
3. Neraca dan laporan laba-rugi mencerminkan transaksi-transaksi keuangan dari waktu ke waktu.
4. Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai factor yang dapat mempengaruhi posisi atau keuangan perusahaan

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan menganalisis dari variabel penerapan sistem informasi akuntansi dinas daerah (SIADINDA) terhadap variabel pengelolaan data keuangan. Variabel penerapan sistem informasi akuntansi dinas daerah (SIADINDA) ini akan di analisis melalui indikator berdasarkan implementasi SIADINDA yang terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2008 yaitu : (1) Barang belanja modal, (2) Belanja pegawai, (3) Barang dan jasa.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam struktur pengelolaan keuangan daerah dari anggaran keuangan daerah. Pengelolaan keuangan didasarkan pada kiprah pemerintah pada pengembangan pelayanan publik. Sehingga tingkat hasil yang dicapai ditentukan oleh kemampuan sumber daya aparatur dalam mengelola keuangan daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan penggunaan dana atau anggaran yang dibuat untuk mendukung kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diharapkan dari pengelolaan keuangan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan ketika

menggunakan anggaran keuangan. Harapan untuk mendapatkan hasil yang baik tidak lepas dari peran aparatur dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Jendral Urip Sumuharjo No.269 Makassar 90231 dengan telepon (0411) 453487. Informasi mengenai Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat diakses melalui <http://bkd.sulseslprov.co.id/> untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan \pm 2 bulan.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data primer data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung yang bersumber dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara. Dalam penelitian ini, data primer berupa catatan wawancara dan observasi yang diperoleh melalui wawancara dengan staf instansi yang berwenang atas data yang diminta.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk

data-data, dokumen, tabel-tabel mengenai topik penelitian. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang berasal dari data primer yaitu dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, laporan kegiatan, buku, literature.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut (Riduwan, 2018) :

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil
- b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui ha-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturanperaturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yang dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan

dan studi dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Penelitian deskriptif, dilakukan untuk menguraikan aspek-aspek fenomena atau karakteristik variabel atau objek yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik objek yang diteliti, atau menyusun profil objek, atau membantu membuat keputusan-keputusan sederhana seperti jumlah, proporsi, rata-rata, atau trend. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, disimpulkan dan diverifikasi.

3.5 Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem merupakan proses pelaksanaan suatu gagasan atau rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa unsur, baik fisik maupun nonfisik dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan dalam melaksanakan program-program yang telah di rumuskan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Informasi adalah hasil dari pengolahan data atau data yang sudah di proses menjadi sebuah bentuk yang lain kemudian digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berguna bagi penerimanya.
3. Akuntansi merupakan aktivitas dalam perusahaan yang menghasilkan informasi akuntansi tentang kondisi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat,

menggolongkan, mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

4. Sistem informasi akuntansi adalah mencatat, mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data yang menjadi suatu informasi atau laporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan.
5. Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) merupakan suatu bentuk memanfaatkan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual maupun elektronik dalam mengambil data pembukuan dan melaporkan semua transaksi keuangan, aset, utang, serta seluruh entitas pemerintah daerah.
6. Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan seluruh transaksi keuangan atau kondisi keuangan suatu entitas baik sektor publik maupun swasta, yang dimana hasil laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi sebuah informasi dan bermanfaat bagi pihak yang menggunakannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan berkantor di satu lingkup dengan kantor Gubernur yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 269. BKAD secara substansi dibentuk pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2019 “Tentang Peran dan Struktur Organisasi”.

Tugas, fungsi serta prosedur operasional Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana kantor wilayah ini dibentuk dari gabungan dua kantor wilayah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, yang bertugas membantu Gubernur dalam fungsi penunjang kehumasan pengelolaan keuangan yang merupakan badan daerah yang dilimpahkan dengan keputusan pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang menetapkan pedoman tata nama kantor daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pembantu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang pertama dan menjabat saat ini adalah Bapak Drs. Muhammad Rasyid, yang

dibantu oleh seorang sekretaris dan empat Kepala Bidang dan 15 orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.

Pada hakikatnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah kesiapan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, patuh, efisien, transparan, efektif, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kepentingan umum. Jelas, gagasan utama harus diwujudkan melalui manajemen yang efektif, yang memiliki lima pilar utama: inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

Dalam mengemban misi kepala daerah, hal ini karena memuat pernyataan yang perlu dibuat untuk mewujudkan visi pemimpin daerah, yang bukan sekedar impian atau rangkaian harapan, tetapi komitmen untuk memenuhi misi kepala daerah. Misi kepala daerah untuk lima tahun ke depan, berdasarkan isu-isu analisis strategis, disertai dengan kinerja objektif, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun dan pencapaiannya secara bertahap.

Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, pertama: meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar tertib, patuh, transparan dan bertanggung jawab. Kemudian, kedua, meningkatkan tanggung jawab keuangan aparatur daerah.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemprov Sul-Sel telah melakukan penataan kelembagaan yang dikukuhkan dengan SK Gubernur tahun 2010. Pelaksanaan penataan kelembagaan yang dilaksanakan berimplikasi pada

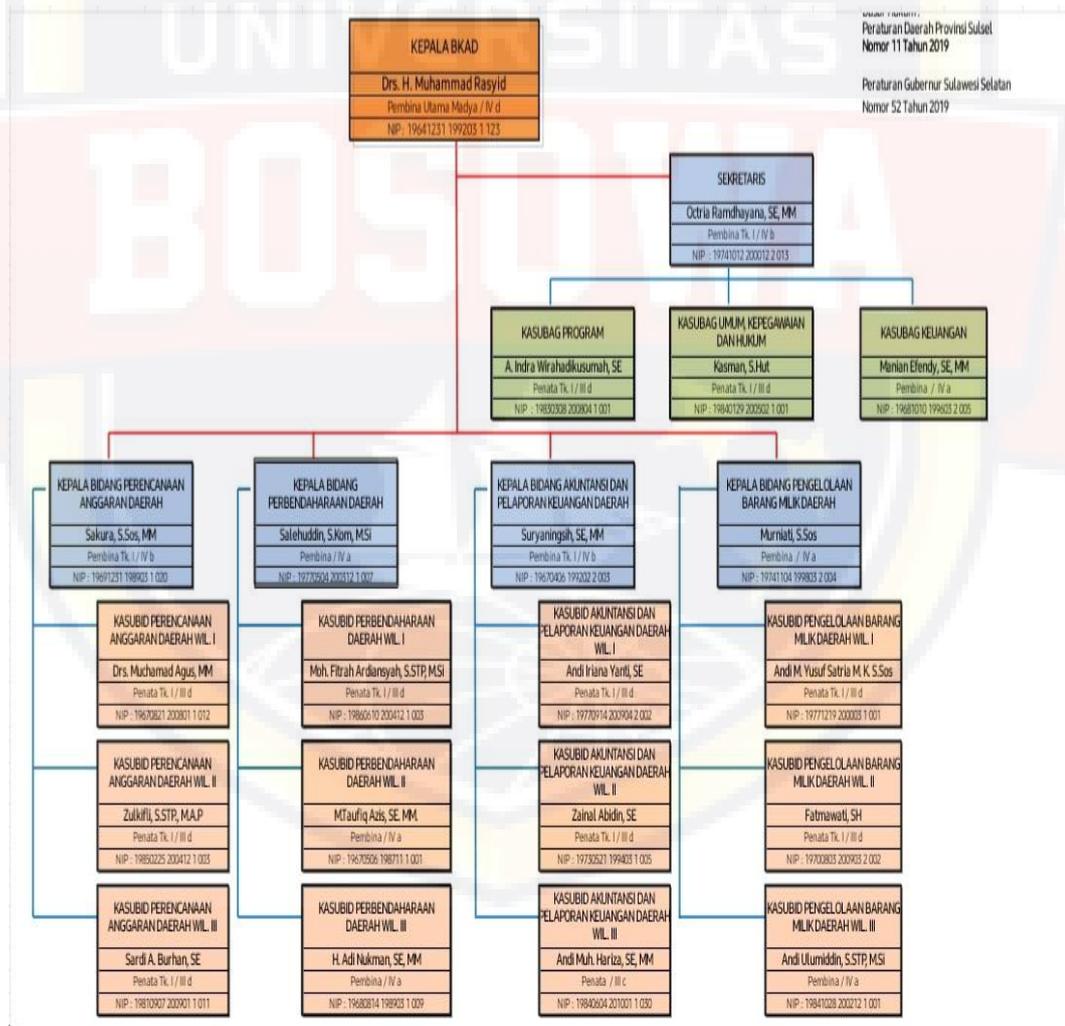
perubahan status dari Biro Keuangan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

4.1.2 Struktur Organisasi

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas maka diperlukan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi ini merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan antara bagian-bagian pada instansi/perusahaan.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel



Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Selatan (2022)

4.1.3 Job Description

Badan Keuangan dan Aset Daerah terbagi atas enam bagian serta mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Beberapa tugas pokok kepala badan yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas.
- e. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Menyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan badan. Beberapa tugas pokok sekretaris yaitu:

- a. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan.
- b. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh

masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas.

- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan.
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan.
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum.
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang perencanaan anggaran daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang perencanaan anggaran daerah. Beberapa tugas pokok bidang perencanaan anggaran daerah yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA/PPAS Perubahan.
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD atau RKA Perubahan/ DPPA SKPD.

- c. Melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- d. Melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD.
- e. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah.

Bidang perencanaan anggaran daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang perencanaan anggaran daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang perencanaan anggaran daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang perencanaan anggaran daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang perbendaharaan daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah. Beberapa tugas pokok bidang perbendaharaan daerah yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang perbendaharaan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perbendaharaan daerah mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
- e. Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah.

Bidang perbendaharaan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah.
 - d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis

fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Beberapa tugas pokok bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yaitu:

- a. Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- b. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi.
- c. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD.
- e. Menyusun tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan barang milik daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan barang milik daerah. Beberapa tugas pokok bidang pengelolaan barang milik daerah yaitu:

- a. Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang.
- b. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- c. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah.
- d. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- e. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Bidang pengelolaan barang milik daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam pengelolaan data keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah sangat terbantu dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) karna aplikasi tersebut didesain untuk membantu pegawai/staf dalam mengelola data keuangan khususnya pada pengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta interpretasi atas hasil laporan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teoritis dan metodologis yang telah diuraikan, pada subbab ini hasil penelitian akan disajikan melalui wawancara langsung dengan pegawai/staf yang terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA). Semua data hasil penelitian diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian.

4.2.1 Pemahaman dan Keberhasilan Penerapan SIADINDA dalam Pengelolaan Data Keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan

SIADINDA merupakan sistem yang dirancang untuk membantu dan memudahkan dalam pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pegawai yang terkait dengan pengoperasian SIADINDA sesungguhnya telah paham dengan tujuan penerapan SIADINDA. Terbukti dengan hasil wawancara dengan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terkait dengan sistem tersebut, diantaranya dengan Bapak Gunawan, seorang staf keuangan yang bertugas membuat laporan keuangan mengatakan bahwa:

“SIADINDA itu membantu kami dalam menyusun laporan keuangan dan penerapannya itu sangat bagus dan lancar. Cuma masalahnya itu biasa keadaan jaringan internet, karna servernya ini disimpan bukan disini, melainkan ditempat lain. Kalau masalah *human eror* aplikasinya masih bisa diatasi itu. Siadinda ini sangat membantu sekali, kalau tidak ada aplikasi ini susah dan ribet karna harus di excel kan satu per satu terlebih dahulu, dikumpulkan di satu file, setelah itu baru di input. Kalau di siadinda itu cuma sekali kita masukkan, diproses, dan sudah bisa dijadikan laporan keuangan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Slamet yang merupakan kepala sub bagian keuangan, mengatakan bahwa:

“SIADINDA itu diterapkan disini tahun 2015, untuk penerapannya sangat membantu pengelolaan keuangan daerah. Itu sistem dikembangkan di daerah masing-masing untuk pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah itu dari tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan, nah itulah siadinda. Kalau keberhasilan penerapan sistem itu pasti ada cacatnya, tidak mungkin ada yang 100%. Tapi kalo lihat SIADINDA dari keuangan itu 80-90% karna output kita ini kan dokumen, selama dokumen tercipta itu dianggap sudah berhasil”.

Selanjutnya Bapak Slamet juga mengungkapkan bahwa:

“siadinda dalam pengelolaan data keuangan sangat membantu dek, sistem itu memakai jaringan, tiba-tiba ada pemeriksaan bisa langsung dibuka tanpa ada bukti fisik dokumen lagi, jadi kalau secara sistematis, tersistematis. Masing-masing ODP menginput, outputnya di induk sistem ini yaitu kalau bukan di anggaran, di akuntansi ataupun di perbendaharaan.

Di sistem siadinda ini sudah mencakup seluruh aturan yang ada di permendagri No. 12 tentang Pengelolaan keuangan daerah, PP No. 77 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta PP No. 64 tentang pedoman pelaksanaan APBD”.

Dari beberapa pendapat tersebut telah sesuai dengan pengertian SIADINDA menurut Murfa Surya Mahardika (2018) selaku pembuat sistem tersebut, dimana menjelaskan SIADINDA merupakan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam mengelola data keuangan.

Selain pemahaman pegawai terhadap sistem tersebut, untuk menambah pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap SIADINDA, pegawai juga perlu mengetahui apa tujuan dari penerapan sistem SIADINDA. Menurut Rahmat, Diding (2017) Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut. Penjelasan berikut ini mengenai pemahaman pegawai terhadap tujuan dari penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan.

Penjelasan oleh staf keuangan yang bertugas membuat laporan keuangan, Bapak Gunawan mengatakan bahwa:

“Tujuan penerapannya siadinda itu untuk memperlancar proses laporan keuangan sampai menjadi laporan keuangan yang utuh, yang sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP). Karna semua apa yang kita bikin pasti menuju ke laporan keuangan, karna itu laporan keuangan diperiksa BPK, setelah diperiksa BKP mengeluarkan opini apakah laporan keuangan ini sudah betul, wajar atau tidak.”.

Pada penjelasan oleh Bapak Slamet kepala sub bagian keuangan mengatakan bahwa:

“Ini kan bicara sistem, tujuan dari sistem itu untuk mengontrol laju keuangan dari tahap perencanaan penganggaran sampai dengan pelaporan. Sekarang di zaman digital atau modern ini perlu adanya sistem, yang dapat membackup database pengelolaan data keuangan daerah. Untuk lingkup provinsi tujuan dibentuk siadinda ini untuk mengumpulkan data-data yang ada diseluruh OPD sebagai data base tentang pengelolaan data keuangan daerah”.

Selain pemahaman pegawai terhadap tujuan dari penerapan sistem tersebut yang dapat mempermudah pekerjaan pegawai, SIADINDA juga sangat meringankan pekerjaan dan mempercepat pengelolaan data keuangan di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilihat dari pendapat Bapak Gunawan selaku staf keuangan yang mengemukakan bahwa:

“Siadanda sangat meringankan pekerjaan dan mempercepat pengelolaan data keuangan, kita kan memakai SOP ada waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah laporan, setiap bulan harus menyelesaikan pada tanggal sekian. Kalau memakai manual lama prosesnya, apalagi keuangan itu besar dia punya anggarannya, jadi butuh aplikasi yang cepat untuk memproses laporan keuangannya”.

Adapun pendapat dari kepala sub bagian keuangan yaitu Bapak Slamet mengatakan bahwa:

“Sudah pasti itu meringankan beban sekali, tidak perlu dihitung lagi, sudah terumus dalam sistem, otomatis, cetakannya pun sudah ada template laporan di dalam sistem, jadi sangat-sangat meringankan”.

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang terkait dengan aplikasi SIADINDA sudah mengerti dan mengetahui tujuan dari penerapan sistem tersebut dalam pengelolaan data keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan sangat dapat membantu dan meringankan pekerjaan, dimana pegawai dalam membuat laporan keuangan hanya melakukan penginputan dan selanjutnya secara sistematis diproses oleh sistem SIADINDA. Tentunya dengan ini pegawai memanfaatkan

sistem tersebut dengan baik karna dapat membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi sangat cepat dan mengefektifkan waktu dengan baik.

Selain itu, dalam penerapan SIADINDA tentunya pegawai juga harus mengetahui dan memahami setiap *input* yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIADINDA serta *output* apa yang akan dihasilkan. Dalam permendagri No. 13 tahun 2006, *output* yang diharapkan dari proses pengolahan data keuangan SIADINDA terdiri dari unsur laporan keuangan pemerintah daerah.

Berikut ini wawancara dengan kepala sub bagian keuangan BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Slamet mengungkapkan bahwa:

“Kalau cara memahami *input* itu ada semacam *manual book* oleh sistem, itu di *download* dan dipelajari masing-masing operator. Kalau mengalami kendala akan ada pihak ketiga (pemilik sistem) yang datang langsung untuk memberikan arahan terkait penginputan-penginputan. Untuk *outputnya* itu sudah paten, semua itu formatnya yang ada di permendagri. Jadi kalau secara *outputnya* itu dokumen-dokumennya sudah tidak bisa diubah lagi, dan juga sistem siadinda itu mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dan *outputnya* itu sudah mencakup yang dipakai seluruh indonesia, walaupun beda-beda sistem setiap daerah tapi kita tetap satu format, aturan dan kaidah”.

Selanjutnya penjelasan oleh Bapak Gunawan salah satu staf bagian keuangan, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Jadi dalam memahami *inputnya* itu bagaimana mengelola itu data untuk menghasilkan *output* yang sesuai dengan SOP untuk menghasilkan laporan keuangan. karna jika datanya tidak betul untuk *inputnya* maka tidak akan menghasilkan *output* yang sesuai dengan SOP”.

Ketelitian pegawai/staf keuangan sangat diperlukan pada saat membuat suatu laporan keuangan mulai dari proses penginputan sampai *outputnya* karna nantinya hasil dari laporan keuangan tersebut akan menjadi sebuah informasi bagi pihak yang menggunakan atau membutuhkannya. Untuk memperdalam

pemahaman pegawai terhadap sistem tersebut, berikut ini hasil wawancara terhadap pegawai yang berhubungan dengan SIADINDA tentang kinerja kerja SIADINDA terkait dengan proses penginputan data untuk mendapatkan hasil yaitu:

Penjelasan oleh Bapak Gunawan yang merupakan salah satu staf bagian keuangan mengatakan bahwa:

“Jadi proses untuk mengasilkkan sebuah laporan keuangan itu dari SPM (Surat Perintah Membayar), ini SPM diketik dulu dari sistem siadinda, di print kemudian ditandatangani, setelah selesai diproses diturunkan di perbendaharaan dan menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Setelah SP2D terbit, bagian keuangan menginputnya dipenatausahaan untuk melunaskan, apa betul ini barang sudah dibayar atau belum. Jika sudah dibayar, maka akan dilunaskan di aplikasi, kalau ini sudah dibayarkan ditanggal sekian dan data tersebut nantinya akan merujuk untuk menjadi laporan keuangan”.

Adapun penjelasan dari Bapak Slamet kepala sub bagian keuangan mengatakan bahwa:

“Prosesnya sebenarnya itu sudah tersistematis dek, dari penginputan di sistem sampai menghasilkan outputnya dalam bentuk laporan. Cuma kendalanya disitu kadang jaringan ataupun servernya yang lambat *loading* karna penggunaan ini kan dibatasi, jadi jika banyak yang pakai ya agak lambat *loading*”.

Dari wawancara diatas sangat memperjelas tentang pemahaman pegawai BKAD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap makna dari SIADINDA. Pemahaman tersebut dapat diketahui melalui pengetahuan pegawai terhadap pengertian, tujuan, manfaat serta *input* dan *output* yang akan dihasilkan dari penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan dan juga hal tersebut menambah pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai proses penyusunan laporan keuangan pada sistem SIADINDA.

4.2.2 Faktor Pendukung yang Dimiliki BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Sehingga Menerapkan SIADINDA

Penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan yang dilakukan oleh BKAD Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tidak luput dari faktor pendukungnya. Beberapa faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh BKAD Provinsi Sulawesi selatan dalam penerapan SIADINDA salah satunya dengan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimana nantinya menjadi penentu dari keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini penerapan SIADINDA. Hal ini dikemukakan dalam wawancara dengan kepala sub bagian keuangan, Bapak Slamet yang mengemukakan bahwa:

“SDM yang ada di BKAD ini mau menerima sistem ini untuk dipelajari karna sistem ini datang untuk mempermudah pekerjaan. Jadi mereka *welcome* semua menerima sistem ini”.

Untuk mendapatkan keberhasilan yang baik dalam penerapan suatu kebijakan, pegawai yang terkait dengan pengoperasian SIADINDA mendapatkan pelatihan khusus dalam penerapan sistem tersebut. Hal ini terbukti dengan wawancara dengan salah satu staf keuangan yaitu Bapak Gunawan, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengoperasian siadinda sendiri ada pelatihan. Pelatihannya tergantung kalau ada pengembangan aplikasi, ada tambahan atau ada perubahan dari pusat”.

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Bapak Slamet yang merupakan kepala sub bidang keuangan, yang menyatakan bahwa:

“Pegawai disini ada pelatihan, semacam bimtek (Bimbingan Teknis) atau sosialisasi. Yang selenggarakan itu pihak terkait, kan siadinda ada beberapa misalnya dri segi anggaran, itu berarti anggaran yang laksanakan, pelaporan itu akuntansi. Jadi ya pelatihan dilaksanakan itu tergantung dari tahapan apa sekarang dan bidang yang menangani. Selain pelatihan juga mendapatkan modul, modul didapatkan pada saat pelatihan”.

Berdasarkan wawancara diatas membuktikan bahwa sumber daya manusia sangat penting bagi suatu hal. Sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan suatu kebijakan yang baik pula, karna mampu melaksanakan pengawasan yang benar dan sesuai dengan penerapannya. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan SIADINDA di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan didukung beberapa faktor dalam sumber daya manusianya yaitu, dalam penerapan siadinda pegawai dibekali dengan pelatihan khusus atau bimtek dan kesadaran pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan saling berdiskusi dengan pegawai yang lainnya dalam penerapan SIADINDA.

2. Komunikasi

Adanya komunikasi yang tepat dapat memberikan suatu hal yang baik. Komunikasi yang baik dalam penerapan suatu kebijakan akan berjalan secara efektif jika tujuan dan ukuran-ukuran dari penerapan tersebut dipahami oleh seseorang yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan. Berikut ini hasil wawancara dengan seorang staf keuangan yaitu Bapak Gunawan, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi dek, sebelum diterapkan sudah ada sosialisasi terlebih dahulu bahwa akan ada kebijakan baru yang akan diterapkan, selain itu atasan juga sudah menyampaikan tentang kebijakan tersebut. Sebelum diterapkan juga atasan dan pegawai berdiskusi tentang tujuan dalam penerapan kebijakan itu. Tidak mungkin langsung diterapkan tanpa adanya sosialisasi atau pembicaraan tentang hal tersebut”.

Dalam wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam penerapan suatu kebijakan memerlukan kerjasama dengan yang lain, karna dalam penerapan kebijakan semua personil yang terlibat harus menyetujui terlebih dahulu dan mereka harus mengetahui secara jelas apa maksud dan tujuan dari penerapan kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sosialisasi atau komunikasi yang baik dari atasan kepada pegawai. Selain sumber daya manusia dan komunikasi yang baik, faktor pendukung lainnya yang dimiliki BKAD Provinsi Sulawesi Selatan untuk penerapan SIADINDA yaitu dengan adanya dukungan dari pejabat-pejabat. Hal ini dijelaskan oleh kepala sub bagian keuangan, Bapak Slamet mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung lainnya juga dari pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat yang mendukung adanya sistem ini baik dari segi materi maupun moral.

Dengan adanya dukungan dari pejabat yang baik maka akan menciptakan sebuah kebijakan yang ideal dan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebagai apapun sebuah kebijakan penerapan, jika output yang dihasilkan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka kebijakan penerapan tersebut dianggap gagal.

Dari hasil penelitian pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan tentang kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIADINDA. Bapak Gunawan selaku salah satu staf keuangan yang bertugas membuat laporan keuangan mengatakan bahwa:

“Kualitas informasi yang dihasilkan dari siadinda itu bagus dan betul karna kalau hasilnya tidak betul ya aplikasinya tidak akan digunakan

lagi, jadi aplikasinya harus siap untuk dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam pembuatan laporan keuangan biasa menghemat waktu, tinggal diinput, sistem yang proses dan sudah jadi laporan keuangan, meskipun itu harus teliti juga pada saat penginputan agar tidak ada kesalahan”.

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik. Dengan adanya sistem ini dapat memudahkan dan menghemat kerja pegawai, karna pada saat pembuatan laporan keuangan pegawai hanya menginput data ke dalam format yang telah disediakan, setelah itu sistem yang akan memproses dan akan menjadi sebuah laporan keuangan. Meskipun seperti itu, hal ini tidak luput dari pengawasan dan ketelitian pegawai pada saat penginputan atau pembuatan laporan keuangan pada sistem SIADINDA.

4.2.3 Hambatan dalam Menggunakan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam penerapan sebuah sistem tentunya ada nilai *plus* dan *minus* yang akan dihasilkan. Penerapan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai *plus* yang banyak, selain dapat mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan juga dapat mempermudah pekerjaan pegawai. Akan tetapi, dalam penerapan SIADINDA juga memiliki beberapa hambatan. Hambatan tersebut akan dijelaskan melalui wawancara dengan kepala sub bagian keuanga, Bapak Slamet mengemukakan bahwa:

“Hasil yang biasa dikeluarkan siadinda itu kadang ada beberapa kesalahan data ataupun adanya perubahan perubahan angka, kadang itu yang membuat salah satu kendalanya juga, ada mutasi-mutasi angka antar rekening, itu kesalahan dari sistem bukan dari kesalahan kami, biasanya ada yang didapat seperti itu”.

Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Gunawan yang merupakan salah satu staf keuangan, beliau mengatakan bahwa:

“Kendalanya itu biasa keadaan jaringan internet, karna servernya ini disimpannya bukan disini, melainkan ditempat lain. Jadi jika jaringannya tidak bagus dan servernya lagi bermasalah pada saat penginputan belum tersimpan, maka saya harus mengulang kembali proses penginputan itu dari awal lagi”.

Dalam mengurangi kendala yang terjadi pada suatu sistem perlu adanya pembaharuan terhadap sistem tersebut, agar kedepannya dalam pemrosesan akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Begitupun dalam wawancara dengan kepala sub bagian keuangan, Bapak Slamet mengatakan bahwa:

“Kalau saya sih perlu ditingkatkan atau diperbaharui lagi, apalagi terutama server, jaringan, serta data-data yang biasa salah nilai, ataupun format penjumlahannya itu kadang tidak sesuai dengan yang dihitung manual biasa seperti itu, ditingkatkan lagi.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Gunawan seorang staf keuangan, yang mengemukakan bahwa:

“sistem siadinda ini sudah bagus, untuk orang yang baru memakainya akan cepat memahami karna pengoperasiannya yang mudah dan dalam membuat laporan keuangan sangat cepat. mungkin lebih ditingkatkan ke server ya, karna aplikasinya kadang loadingnya lama.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diatas membuktikan bahwa tingkat keberhasilan suatu proyek teknologi sistem informasi secara keseluruhan masih rendah. Dalam hal ini, sistem SIADINDA juga masih harus lebih ditingkatkan karna masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Dengan adanya pembaharuan dan perbaikan terhadap suatu sistem akan sangat bermanfaat bagi pihak yang menggunakan sistem tersebut dan juga data yang dihasilkan dari sistem yang telah diperbarui pastinya akan lebih baik dan lebih akurat.

4.3 Pembahasan

Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) merupakan salah satu sistem yang membantu proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengelola data keuangan dengan sistem informasi akuntansi dapat mengurangi kesalahan. Dibandingkan dengan proses manual, pengolahan data keuangan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi memungkinkan untuk mengolah dan menyajikan data secara cepat dan *up to date* sehingga dapat digunakan setiap saat.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini dijadikan pedoman oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Susanti dan Budiwitjaksono, 2019).

Penerapan SIADINDA pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti indikator pengukuran menurut *American Institute of Chartered Public Accountants* (AICPA) dalam penelitian Sidik, Muchamad (2016) memberikan empat indikator sistem informasi akuntansi.

Pertama, ketersediaan (*availability*) berarti sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantumkan pada pernyataan atau perjanjian tingkat pelayanan. Jika disandingkan dengan akuntansi, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah memiliki sistem tersebut yaitu SIADINDA. Ketersediaan sistem tersebut untuk membantu dalam proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan, selain berfungsi untuk pengelolaan atau pemrosesan data, juga menjalankan fungsi pengumpulan data, pemrosesan atau pengolahan data, manajemen data, pengendalian dan pengamanan data, dan fungsi penyedia informasi, karna hasil dari laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi sebuah informasi bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakannya dalam mengambil suatu keputusan.

Sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji. Teknologi informasi merupakan alat yang digunakan dalam proses mengolah hingga menyampaikan informasi, teknologi informasi yang baik dan berkelanjutan akan menimbulkan sebuah sistem informasi yang baik pula. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan kinerja para individu sebagai anggota organisasi (Antari *et.,al*, 2016)

Kedua, keamanan (*security*) berarti Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Dalam pengoperasian sistem SIADINDA pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hanya dilakukan oleh pihak yang terkait dalam pengelolaan data keuangan. Dalam

hal ini, tingkat keamanan yang dimiliki sistem tersebut sudah bagus apalagi dalam pengoperasian sistem sudah mengikuti *Standar Operating Prosedure (SOP)* dan juga sebelum melakukan login pada sistem SIADINDA harus menggunakan *username* dan *password* yang dimana itu hanya diketahui oleh pegawai yang terkait dengan sistem dan pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penerapan keamanan pada sistem informasi bertujuan untuk mengatasi segala masalah dan kendala baik secara teknis maupun secara non-teknis yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Keamanan dianggap penting karena jika informasi diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan dipertanyakan, sehingga informasi tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Adanya masalah keamanan memicu prosedur kontrol akses dalam sistem informasi. Menurut Khairina (2016) Masalah keamanan merupakan masalah yang penting dan utama dalam sistem komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Data maupun informasi menjadi target serangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga perlu untuk menjaga integritas data dan informasi. Dalam aplikasi web dibutuhkan mekanisme yang dapat melindungi data dari pengguna yang tidak berhak. Seiring banyaknya fasilitas internet yang membutuhkan akses masuk (login) seperti email, akses web server maupun account lainnya, maka user perlu lebih berhati-hati terutama jika account tersebut sangat rahasia dan berharga mengingat internet merupakan jaringan publik.

Ketiga, dapat dipelihara (*maintainability*) berarti sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integrasi

sistem. Pada Sistem SIADINDA di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi selatan sangat dipelihara dengan baik karna sistem tersebut masih digunakan sampai sekarang dalam proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan. Jika sistem tersebut mengalami kerusakan maka sistem itu tidak akan digunakan lagi, mengingat tugas dari sistem SIADINDA ini adalah hal yang penting karna sistem tersebut bertugas untuk membantu proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana harus menyajikan data atau laporan keuangan yang benar dan akurat karna nantinya akan menjadi sebuah informasi oleh pihak yang membutuhkan untuk mengambil suatu keputusan.

Pemeliharaan atau *maintainability* suatu sistem memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi dan pengembangan sistem informasi, kqarena pemeliharaan berkala memungkinkan untuk mendeteksi kesalahan yang perlu cepat diperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan karakteristiknya agar memiliki kinerja yang baik dalam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. *Maintainability* sangat penting karena kestabilan suatu sistem informasi tergantung pada pemeliharaan yang baik serta kemudahan pemeliharaan sistem informasi tersebut.

Keempat, integrasi (*integrity*) berarti pemrosesan sistem bersifat lengkap akurat, tepat waktu, dan diotorisasi, Sebuah sistem dikatakan memiliki integrasi apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dalam proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan menggunakan sistem SIADINDA. Dalam pengoperasian sistem tersebut pegawai hanya melakukan penginputan, selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan yang dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Hal ini sangat mempermudah, menghemat waktu dan meringankan pekerjaan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan.

Laporan keuangan yang disusun harus memadai dan konsisten dengan tujuan bisnis, serta memiliki ukuran dan kekuatan uji reliabilitas yang harus jelas dan dapat dipahami oleh siapa saja sesuai dengan siklus akuntansi yang jelas, sehingga pihak yang membutuhkan informasi keuangan dari laporan tersebut dapat mengerti isinya dengan jelas. Laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ada dan tidak boleh dibuat dengan data rekayasa tanpa dasar yang kuat seperti konfirmasi transaksi, dan lain-lain. Informasi keuangan yang disajikan harus apa adanya, tanpa adanya cakupan informasi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerapan SIADINDA pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif karena sudah sesuai dengan indikator pengukuran menurut *American Institute of Chartered Public Accountants* (AICPA) dalam penelitian Sidik, Muchamad (2016).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam struktur pengelolaan keuangan daerah dari anggaran keuangan daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah memahami makna dan tujuan dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) yaitu sistem yang menggabungkan antara proses manual dan proses komputerisasi yang diperuntukan untuk membantu penyusunan atau pengelolaan data keuangan. Namun dalam proses pengoprasian Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) masih mengalami gangguan yaitu pada sistem yang jaringan servernya yang kurang lancar sehingga menyebabkan keterlambatan proses pada penyusunan atau pengelolaan data keuangan, dan juga masih ada beberapa kesalahan pada hasil datanya dimana jumlah yang dihasilkan berbeda jika dihitung secara manual.

Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) dapat mempermudah, menghemat waktu dan meringankan pekerjaan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan, dimana pegawai langsung melakukan penginputan pada SIADINDA selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk

laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Terciptanya laporan keuangan yang baik tidak luput dari pengawasan dan ketelitian pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada saat proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan pada sistem.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengajukan usulan kepada pemilik sistem SIADINDA untuk dilakukannya pembaharuan atau perbaikan terhadap sistem tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih benar dan akurat serta jaringan atau server dari sistem agar lebih ditingkatkan lagi.
2. Agar dapat menghasilkan penelitian yang baik, maka perlunya melakukan metode lain selain dengan seperti menyebarkan kuesioner terhadap responden agar dapat mendukung hasil penelitian.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait sistem informasi akuntansi untuk menambahkan variabel dan indikator lain yang mendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, (2018). Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance*, Volume 1 Nomor 1.
- Antari, Dkk (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi*, Vol 3 No.1.
- Bahri, 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Cahyono, (2018). Pengeruh Citra Merek, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Hp Merek Oppo Di Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 1.
- Damayanti, Dkk, (2021). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Tabungan Siswa pada SD Ar-Raudah Bandarlampung. *Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI,)* Vol. 11 No. 1.
- Darbianda, (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang*. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Darma dan Sagala, (2020). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 4 No. 1.
- Heriyanto, (2018). Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web Pada PT. APM RENT CAR. *Jurnal Intra-Tech*, Vol. II, No.2.
- Hertati dan Safkaur, (2020). Dampak Revolusi Industri 4.0 Era Covid-19 pada Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 3.
- IAI, (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Jermias, (2016). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Gaji Dan Upah Pada Pt. Bank Sinarmas Tbk. Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4 No. 2.
- Jumingan,2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara

- Khairina, (2016). Analisis Keamanan Sistem Login. *Jurnal Informatika Mulawarman*, Vol. 6 No.2.
- Maryana, Dkk. (2018). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Bandung). *Prosiding Akuntansi*, Vo. 4 No. 2.
- Massie., Dkk, (2018). Analisis Pengendalian Biaya Produksi Untuk Menilai Efisiensi Dan Efektivitas Biaya Produksi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 3.
- Mu'am, (2016). *Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing
- Natalegawa dan Gunadi, (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Pada PT. Wijaya Kusuma Terang Perkasa. *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 13, No. 2.
- PT. Murfa Surya Mahardika, (2018). "Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah". <https://www.msmgroup.co.id/produk348-SIADINDA.html>, diakses pada 21 Januari 2022 pukul 22.31.
- Purnamasari, Anisa Yudia. (2016). *Pengaruh Organizational Learning Terhadap Competitive Advantage Melalui Accounting Information System (Studi Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Di Kota Bandung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pasundan, Bandung.
- Purwaningrum, Septa (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Purwanti, Endang (2017). Analisis Pengetahuan Laporan Keuangan Pada Umkm Industri Konveksi Di Salatiga. *Jurnal Stieama*, Vol.10 No. 20.
- Rahmat, Diding (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04 Nomor 01.
- Rahmawati., Dkk. (2019). Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Umkm Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Cahaya Aktiva*, Vol. 09 No. 02.
- Rahmayuni, (2017). Peranan Laporan Keuangan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Pada Ukm. *Jurnal Social Humaniora Dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1.

- Riduwan, (2018). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta cv.
- Setyowati dan Respati, (2017). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Computer Self Efficacy, Dan Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No 1.
- Setyowati, Dkk, (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2.
- Sidik, Muchamad, (2016). *Pengaruh Partisipasi Pengguna Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi Akuntansi (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia
- Situmorang dan Hapsari, (2019). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Belajar Akutansi Di Daerah 3T. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7 No.1.
- Suharni dan Sari, (2019). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Di Kota Madiun. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Volume 8 Nomor 2.
- Suryanawa dan Abhimantra, (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Hal: 1782-1809.
- Susanti dan Budiwitjaksono. (2019). Fraud Diamond Theory dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *Behavioral Accounting Journal*. 2(2):2017-223.
- Trisno, Dkk. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No.1
- Yanti dan Musmini, (2020). Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha. *Jurnal Akuntansi Profesi* Vol. 11 No 1.
- Yanto dan Akfir, (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). *Indonesian Journal Of Strategic Management*, Vol. 3 No. 1.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah sejauh mana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang Sistem Informasi Akuntansi Daerah (SIADINDA) dan sejauh mana keberhasilan penerapan SIADINDA pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah *Standar Operating Procedure* (SOP) Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan sudah dilakukan dengan baik?
3. Apakah aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) sangat membantu dalam mengelola data keuangan BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apa tujuan dari penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

5. Apakah aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) dapat meringankan pekerjaan dan mempercepat pengelolaan data keuangan di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Bagaimana memahami setiap *input* yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIADINDA serta *output* yang akan dihasilkan dari proses pengolahannya?
7. Bagaimana proses pelaksanaan kerja SIADINDA terkait mengenai proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah output?
8. Faktor-faktor pendukung apa yang dimiliki oleh BKAD Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mampu menerapkan SIADINDA?
9. Apakah pegawai pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan SIADINDA mendapatkan pelatihan khusus?
10. Bagaimana Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?
11. Apa hambatan dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?
12. Apakah aplikasi SIADINDA perlu ditingkatkan lagi?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara 1

Tanggal : Kamis, 17 Februari 2022

Waktu : 09:00 – 10:05 WITA

Narasumber : Staf Keuangan

1. Peneliti : Bagaimana pemahaman Bapak tentang SIADINDA dan sejauh mana keberhasilan penerapan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : SIADINDA itu membantu kami dalam menyusun laporan keuangan dan penerapannya itu sangat bagus dan lancar. Cuma masalahnya itu biasa keadaan jaringan internet, karna servernya ini disimpan bukan disini, melainkan ditempat lain. Kalau masalah *human eror* aplikasinya masih bisa diatasi itu. Siadinda ini sangat membantu sekali, kalau tidak ada aplikasi ini susah dan ribet karna harus di excel kan satu per satu terlebih dahulu, dikumpulkan di satu file, setelah itu baru di input. Kalau di siadinda itu cuma sekali kita masukkan, diproses, dan sudah bisa dijadikan laporan keuangan.

2. Peneliti : Apa tujuan dari penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : Tujuan penerapannya siadinda itu untuk memperlancar proses laporan keuangan sampai menjadi laporan keuangan yang utuh, yang sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP). Karna semua apa yang kita bikin pasti menuju ke laporan

keuangan, karna itu laporan keuangan diperiksa BPK, setelah diperiksa BKP mengeluarkan opini apakah laporan keuangan ini sudah betul, wajar atau tidak

3. Peneliti : Apakah aplikasi SIADINDA dapat meringankan pekerjaan dan mempercepat pengelolaan data keuangan di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : Siadanda sangat meringankan pekerjaan dan mempercepat pengelolaan data keuangan, kita kan memakai SOP ada waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah laporan, setiap bulan harus menyelesaikan pada tanggal sekian. Kalau memakai manual lama prosesnya, apalagi keuangan itu besar dia punya anggarannya, jadi butuh aplikasi yang cepat untuk memproses laporan keuangannya.

4. Peneliti : Bagaimana memahami setiap *input* yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIADINDA serta *output* yang akan dihasilkan dari proses pengolahannya?

Narasumber : Jadi dalam memahami inputnya itu bagaimana mengelola itu data untuk menghasilkan *output* yang sesuai dengan SOP untuk menghasilkan laporan keuangan. karna jika datanya tidak betul untuk inputnya maka tidak akan menghasilkan *output* yang sesuai dengan SOP.

5. Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kerja SIADINDA terkait mengenai proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah *output*?

Narasumber : Jadi proses untuk mengasihkan sebuah laporan keuangan itu dari SPM (Surat Perintah Membayar), ini SPM diketik dulu dari sistem siadinda, diprint kemudian ditandatangani, setelah selesai diproses diturunkan di perbendaharaan dan menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Setelah SP2D terbit, bagian keuangan menginputnya dipenatausahaan untuk melunaskan, apa betul ini barang sudah dibayar atau belum. Jika sudah dibayar, maka akan dilunaskan di aplikasi, kalau ini sudah dibayarkan ditanggal sekian dan data tersebut nantinya akan merujuk untuk menjadi laporan keuangan.

6. Peneliti : Apakah pegawai pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan SIADINDA mendapatkan pelatihan khusus?

Narasumber : Untuk pengoperasian siadinda sendiri ada pelatihan. Pelatihannya tergantung kalau ada pengembangan aplikasi, ada tambahan atau ada perubahan dari pusat. Jadi dek, sebelum diterapkan sudah ada sosialisasi terlebih dahulu bahwa akan ada kebijakan baru yang akan diterapkan, selain itu atasan juga sudah menyampaikan tentang kebijakan tersebut. Sebelum diterapkan juga atasan dan pegawai berdiskusi tentang tujuan dalam penerapan kebijakan itu. Tidak mungkin langsung

diterapkan tanpa adanya sosialisasi atau pembicaraan tentang hal tersebut

7. Peneliti : Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : Kualitas informasi yang dihasilkan dari siadinda itu bagus dan betul karena kalau hasilnya tidak betul ya aplikasinya tidak akan digunakan lagi, jadi aplikasinya harus siap untuk dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam pembuatan laporan keuangan biasa menghemat waktu, tinggal diinput, sistem yang proses dan sudah jadi laporan keuangan, meskipun itu harus teliti juga pada saat penginputan agar tidak ada kesalahan.

8. Peneliti : Apa hambatan dalam menggunakan aplikasi SIADINDA di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : Kendalanya itu biasa keadaan jaringan internet, karena servernya ini disimpannya bukan disini, melainkan ditempat lain. Jadi jika jaringannya tidak bagus dan servernya lagi bermasalah pada saat penginputan belum tersimpan, maka saya harus mengulang kembali proses penginputan itu dari awal lagi.

9. Peneliti : Apakah aplikasi SIADINDA perlu ditingkatkan lagi?

Narasumber : sistem siadinda ini sudah bagus, untuk orang yang baru memakainya akan cepat memahami karena pengoperasiannya yang mudah dan dalam membuat laporan keuangan sangat

cepat. mungkin lebih ditingkatkan ke server ya, karna aplikasinya kadang loadingnya lama.



Lampiran 3 : Transkrip Wawancara 2

Tanggal : Kamis, 17 Februari 2022

Waktu : 10:15 – 11:25 WITA

Narasumber : Kasubag Keuangan

1. Peneliti : Bagaimana pemahaman Bapak tentang SIADINDA dan sejauh mana keberhasilan penerapan SIADINDA pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : SIADINDA itu diterapkan disini tahun 2015, untuk penerapannya sangat membantu pengelolaan keuangan daerah.

Itu sistem dikembangkan di daerah masing-masing untuk pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah itu dari tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan, nah itulah siadinda. Kalau keberhasilan penerapan sistem itu pasti ada cacatnya, tidak mungkin ada yang 100%. Tapi kalo lihat SIADINDA dari keuangan itu 80-90% karna output kita ini kan dokumen, selama dokumen tercipta itu dianggap sudah berhasil.

2. Peneliti : Apakah aplikasi SIADINDA sangat membantu dalam mengelola data keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : Siadinda dalam pengelolaan data keuangan sangat membantu dek, sistem itu memakai jaringan, tiba-tiba ada pemeriksaan bisa langsung dibuka tanpa ada bukti fisik dokumen lagi, jadi

kalau secara sistematis, tersistematis. Masing-masing ODP menginput, outputnya di induk sistem ini yaitu kalau bukan di anggaran, di akuntansi ataupun di perbendaharaan. Di sistem siadinda ini sudah mencakup seluruh aturan yang ada di permendagri No. 12 tentang Pengelolaan keuangan daerah, PP No. 77 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta PP No. 64 tentang pedoman pelaksanaan APBD

3. Peneliti : Apa tujuan dari penerapan SIADINDA dalam pengelolaan data keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : Ini kan bicara sistem, tujuan dari sistem itu untuk mengontrol laju keuangan dari tahap perencanaan penganggaran sampai dengan pelaporan. Sekarang di zaman digital atau modern ini perlu adanya sistem, yang dapat membackup database pengelolaan data keuangan daerah. untuk lingkup provinsi tujuan dibentuk siadinda ini untuk mengumpulkan data-data yang ada diseluruh OPD sebagai data base tentang pengelolaan data keuangan daerah.

4. Peneliti : Apakah aplikasi SIADINDA dapat meringankan pekerjaan dan mempercepat pengelolaan data keuangan di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : Sudah pasti itu meringankan beban sekali, tidak perlu dihitung lagi, sudah terumus dalam sistem, otomatis, cetakannya pun

sudah ada template laporan di dalam sistem, jadi sangat-sangat meringkankan

5. Peneliti : Bagaimana memahami setiap *input* yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIADINDA serta *output* yang akan dihasilkan dari proses pengolahannya?

Narasumber : Kalau cara memahami *input* itu ada semacam *manual book* oleh sistem, itu di *download* dan dipelajari masing-masing operator. Kalau mengalami kendala akan ada pihak ketiga (pemilik sistem) yang datang langsung untuk memberikan arahan terkait penginputan-penginputan. Untuk *outputnya* itu sudah paten, semua itu formatnya yang ada di permendagri. Jadi kalau secara *outputnya* itu dokumen-dokumennya sudah tidak bisa diubah lagi, dan juga sistem siadinda itu mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dan *outputnya* itu sudah mencakup yang dipakai seluruh Indonesia, walaupun berbeda sistem setiap daerah tapi kita tetap satu format, aturan dan kaidah

6. Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kerja SIADINDA terkait mengenai proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah *output*?

Narasumber : Prosesnya sebenarnya itu sudah tersistematis dek, dari penginputan di sistem sampai menghasilkan *outputnya* dalam bentuk laporan. Cuma kendalanya disitu kadang jaringan

ataupun servernya yang lambat *loading* karna penggunaan ini kan dibatasi, jadi jika banyak yang pakai ya agak-agak lambat *loading*.

7. Peneliti : Faktor-faktor pendukung apa yang dimiliki oleh BKAD Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mampu menerapkan SIADINDA?

Narasumber : SDM yang ada di BKAD ini mau menerima sistem ini untuk dipelajari karna sistem ini datang untuk mempermudah pekerjaan. Jadi mereka *welcome* semua menerima sistem ini. Faktor pendukung lainnya juga dari pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat yang mendukung adanya sistem ini baik dari segi materi maupun moral.

8. Peneliti : Apakah pegawai pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan SIADINDA mendapatkan pelatihan khusus?

Narasumber : Pegawai disini ada pelatihan, semacam bimtek (Bimbingan Teknis) atau sosialisasi. Yang selenggarakan itu pihak terkait, kan siadinda ada beberapa misalnya dri segi anggaran, itu berarti anggaran yang dilaksanakan, pelaporan itu akuntansi. Jadi ya pelatihan dilaksanakan itu tergantung dari tahapan apa sekarang dan bidang yang menangani. Selain pelatihan juga mendapatkan modul, modul didapatkan pada saat pelatihan.

9. Peneliti : Apa hambatan dalam menggunakan aplikasi SIADINDA di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan?

Narasumber : Hasil yang biasa dikeluarkan siadinda itu kadang ada beberapa kesalahan data ataupun adanya perubahan perubahan angka, kadang itu yang membuat salah satu kendalanya juga, ada mutasi-mutasi angka antar rekening, itu kesalahan dari sistem bukan dari kesalahan kami, biasanya ada yang didapat seperti itu.

10. Peneliti : Apakah aplikasi SIADINDA perlu ditingkatkan lagi?

Narasumber : Kalau saya sih perlu ditingkatkan atau diperbaharui lagi, apalagi terutama server, jaringan, serta data-data yang biasa salah nilai, ataupun format penjumlahannya itu kadang tidak sesuai dengan yang dihitung manual biasa seperti itu, ditingkatkan lagi.

Lampiran 4 : Surat Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26492/S.01/PTSP/2022
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar Nomor : A-122/FEB/UNIBOS/III/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **DEA PUTRI RAMADHANI**
 Nomor Pokok : 4517013059
 Program Studi : Akuntansi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DINAS DAERAH (SIADINDA) DALAM PENGELOLAAN DATA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN "

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Februari s/d 09 Maret 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 08 Februari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 08-02-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No.269 Telp. (0411) 453050 Fax. (0411) 442978
 Makassar 90231

Makassar, 14 Februari 2022

Nomor : 070/1204/II/BKAD
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada,
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Bosowa Makassar
 di-
 Tempat

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Nomor :
 A-122/FEB/UNIBOS?II/2022, tanggal 08 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan
 ini disampaikan bahwa Mahasiswa(i) di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	DEA PUTRI RAMADHANI	4517013059	AKUNTANSI

Pada prinsipnya kami dapat menerima untuk melakukan Penelitian pada Badan Keuangan
 dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 09 Februari s/d 30 Maret 2022.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA BADAN,

[Signature]
Drs. H. MUHAMMAD RASYID
 Pangkat : Pembina Utama Madya IV/d
 NIP : 19641231 199203 1 123

Lampiran 5 : Dokumentasi



